



# **RENCANA KERJA RENJA**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2025**



**DENAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA**

Jl. Raya - Desa KM 9 Telp. (0296) 521025 Fax. (0296) 521025 BLORA 58111  
Website: [www.diskapsipilblora.go.id](http://www.diskapsipilblora.go.id) Email: [diskapsipilblora@gmail.com](mailto:diskapsipilblora@gmail.com)



# **RENCANA KERJA RENJA**

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **KABUPATEN BLORA**

### **TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLORA**

Jl. Blora - Desa KM 3 Tel. (0298) 511020 Fax. (0298) 521276 BLORA 58200  
Website : [www.dinakapsipilblora.go.id](http://www.dinakapsipilblora.go.id). Email : [dinakapsipilblora@gmail.com](mailto:dinakapsipilblora@gmail.com)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Ladedean Hukum.....	1-2
1.3 Maknaud dari Tuguan.....	1-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	1-5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelengguran Tugas dan Fungsi OPD.....	II-11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	II-13
2.5 Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi III-1	
3.2 Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah .....	III-1
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDAFTARAN PERANGKAT DAERAH... IV-1	
4.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	IV-3
BAB V PENUTUP .....	V-1

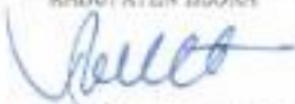
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Kependidikan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan proses pelaksanaan program/kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Blora "Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel".

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari pernyataan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berdasarkan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

KEPALA DINAS  
KEPENDIDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA



Drs. DJOKO SULISTIYONO  
Pembina Utama Muda  
NP<sup>2</sup>. 197105301992031004

LAMPIRAN X  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2025

---

**RENCANA RENJA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLORA**  
**TAHUN 2025**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Letar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kompleks sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Rencana Kerja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Bentas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rencangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsiya. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Perumusan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tujuan, tindak penyuksesan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga wajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang disusun dengan berperjanjian kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RPJPD.

Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perilaku Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Persemaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud diafaunanya Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Diharikannya dokumen perencanaan pembangunan urusan Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2025 yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan Kependidikan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan urusan Kependidikan dan pendidikan sipil tahun sebelumnya (tahun 2023) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2025.

2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Riau ke dalam suatu strategi program/kegiatan Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyuaui ketujuan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2025.
4. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Makrid dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Realisti Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelegaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Kerja Perangkat Daerah

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1. Program dan Kegiatan

##### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

### TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependidikan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/ Kegiatan Urusan Wajib.

Program/kegiatan urusan wajib dikelaskanlkan melalui 4 Program, 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan dan Program Non Urusan OPD dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023, sebagai berikut :

##### 1) Program Rutin

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN 12 bulan tercapai 100%.
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dengan indikator jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 3 dokumen tercapai 100%.
  - b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, dengan indikator jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD dengan target 1 laporan tercapai 100%.
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, indikator jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket tercapai 100%.
    - Penyediaan bahan logistik kantor, dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 6 paket tercapai 100%.
    - Penyediaan bahan cetakan dan pengundum, dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan pengundum yang disediakan dengan target 1 paket tercapai 100%.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, dengan indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 30 dokumen terrealisasi 100%.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan indikator jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
- d) Kegiatan Pengadaan Boring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Pengadaan mebel, indikator jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 1 paket terrealisasi 100%.
  - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya, dengan indikator jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 8 unit terrealisasi 100%.
- e) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan 100% terrealisasi 100%.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Boring Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perisirannya dengan target 41 unit terrealisasi 100%.
  - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, dengan indikator jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara dengan target 6 unit terrealisasi 100%.
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit terrealisasi 100%.

**2) Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Penestatan Sipil**

- **Program Pendaftaran Penduduk**

- a) *Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*, dengan sub kegiatan :
- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dengan indikator jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan target 164.000 laporan terrealisasi 182.228 laporan.
  - Penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan, dengan indikator jumlah laporan penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan dengan target 164.000 dokumen terrealisasi 182.228 dokumen.

- **Program Penestatan Sipil**

- a) *Kegiatan Pelaksanaan Pencairan Sipil*, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan pencatatan sipil, dengan indikator jumlah akta catatan sipil yang diterbitkan dengan target 15.000 akta terrealisasi 19.510 akta.

- **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- a) *Kegiatan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*, dengan sub kegiatan :

- Peningkatan terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, dengan indikator jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan target 2 laporan terrealisasi 3 laporan.
- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan dengan indikator kinerja jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan target 1 data terrealisas 100%.

- **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

- a) *Kegiatan Pengurusan Profil Kependudukan*, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, dengan indikator jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan target 1 dokumen terrealisas 100%

Tabel 2.3  
Rakaperda Inklusi Hukul Pekarkan Rencana Perangkat Daerah dan  
Persepsi Rencana Perangkat Daerah N/2 Tahun 2024  
Komponen Sifat

Indikator	Uraian Definisi sifat Perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Umum (Inklusi Hukul Pekarkan)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kajian Tahun 2024			Perbedaan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah (dalam persen)		
			Target Kinerja Tahun Masa Jangka Panjang dari lebih panjang periode dari tahun 2026	Target Kinerja Masa Jangka Panjang dari lebih panjang periode dari tahun 2027	Target Kinerja Masa Jangka Panjang dari lebih panjang periode dari tahun 2028	Target Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024	Target Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2025	Target Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2026
2	2	2	4	3	3	7	6,7/9,1	-2
A	PROGRAM PENGETAHUA N LINGKUN PEMERINTAHAN DATAHAI	Rencana perencanaan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.	Administrasi Perangkat Daerah	Kesanggupan administrasi perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
P1	Indikator Target pada AOA	Jumlah DPT yang terverifikasi pada perangkat daerah	15	13	14	130	121	131
P2	Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100	95	98	99	97	99
2.	Administrasi Bantuan Miskin Daerah	Persepsi bantuan miskin daerah yang memenuhi standart	100	100	100	100	100	100



L	Pembentukan Bantuan Wilayah dan Pengembangannya	Pembentukan Bantuan Wilayah dan Pengembangannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%
A.	Bantuan Pemerintah Daerah	Jumlah Penduduk Pemerintah Pemerintahan Bantuan Pemerintah Pemerintah Kependidikan Operasional dan Laporan Penyebarluasan Bantuan Kependidikan Lainnya 311104 311105 311106	terdiri dari penduduk dan penduduk dalam kota/kabupaten	41	41	41	41	41
B.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dari Luar daerah penduduk daerah dalam kota/kabupaten	14	30	3	7	10	10
C.	PENDUDUK	Jumlah penduduk daerah dalam kota/kabupaten	1	1	1	1	1	1
D.	PENDUDUK	Cakasan Kependidikan KTP Cakasan Identitas Cakasan Identitas KTP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
E.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
F.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
G.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
H.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
I.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
J.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
K.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
L.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
M.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
N.	PENDUDUK	Jumlah Penduduk dengan pendidikan tertinggi Sekolah Dasar/Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

L	Pengelompokan informasi Karakteristik dan Banyaknya Responden	Kondisi yang dihadapi	Waktu	Usia	Jenis kelamin	Tingkat pendidikan	Daerah	Indikator	Umur
1.	Fraksi hasil Pengelompokan Informasi Responden	Untuk kunci hasil Pengelompokan Informasi Responden	12	17	17	11F	110	1F	13
2.	Persegi Karakteristik yang dimiliki dari Responden	Untuk data karakteristik yang dimiliki oleh responden	1	1	1	1	100	1	1
3.	<b>PROSES PENGOLAHAN PADA RESPONDEN</b>	Proses apa yang dilakukan oleh responden pada karakteristik informasi	10	100%	40%	10%	122,2%	30%	100
4.	Pengelompokan Responden	Profil responden	1014	112 atau atasan	2 atau atasan	2 atau atasan	1200	2	2
	Persegi Karakteristik yang dimiliki responden	Persegi Karakteristik yang dimiliki responden	910	910 atasan	9 atasan	1 atasan	100	9	9

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (KU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1.	Tujuan :							
	Terwujudnya karakter yang berani dan akurasi	Mai - Saip Penugasan Dosen	70	70	72	74	76	80
	Sasaran :							
	Menyediakan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran dalam rangka pencairan atau hakip	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi umum perkantoran yang mendukung atau hakip	100	100	100	100	100	100
2.	Tujuan :							
	Menyajikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Inisiasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan catatan sipil	88	98,2	98,4	98,6	98,8	100
	Sasaran :							
	Menyajikan cairan berstandar administrasi kependudukan dan pematuhan sipil	Cukup layanan administrasi kependudukan dan pematuhan sipil	93	93	93,98	93,96	93,24	99,12

Tabel 2.3  
Persepsi Kinerja Pelegari dan Persepsi Sipil  
Kabupaten Flores yang Mengerti pada QFD

No.	Program	Keluaran	Target 2024 (%)	Indikator Tahun 2024 (%)	Capatin (%)	Tarif Rantau penganggaran	Target Rantau (pt. tahun 2025) (%)
I.	Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Pengembangan Jasa Pengelolaan Sampah	Peningkatan jumlah usaha peternakan dan pengelolaan sampah	100	100	100	100	100
II.	Program Kesehatan Perempuan	Gizi dan Kesehatan Kewanitaan	100,00	100,00	99,00	98,00	96,00
		Gizi dan kesehatan ibu	100	100	100	100	100
		Gizi dan kesehatan anak	100,00	100,00	90,00	70,0	65,00
III.	Program Peningkatan Sosial	Peningkatan kesejahteraan sosial terdampak COVID-19 di Kabupaten	100%	100,50	100,50	100	100,50
IV.	Program Peningkatan Infrastruktur Administrasi Pemerintahan	Peningkatan CIT dan layanan pemerintah yang transparan dan akurasi data berpendidikan	100%	0	0	0	0
V.	Program Pengembangan Pariwisata	Peningkatan CIT dari jumlah yang dimanfaatkan pada sektor pariwisata	40%	100%	222,22%	300%	100,00%

Capaian kinerja pada tabel diatas masih menggambarkan hasil realisasi capaian kinerja semester II Tahun 2023, dikarenakan hasil realisasi capaian kinerja semester I Tahun 2024 belum diterima dari Kemensdagri. Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut antara lain :

- 1) Masih ada penduduk yang belum melakukan perekaman KTP El.  
Realisasi cakupan kepemilikan KTP pada Semester II tahun 2023 97,84%. Dari jumlah wajib KTP tahun 2023 sebanyak : 726.353 yang adalah melakukan perekaman sebanyak 710.688 orang dan yang belum melakukan perekaman KTP sebanyak 15.665 orang.
- 2) Cakupan kepemilikan KIA (Karta Identitas Anak) pada tahun 2023, terlaksana 63,41%, dari jumlah anak usia 0-17 tahun : sebanyak 207.819 anak yang memiliki KIA sebanyak : 131.775 anak dan yang belum memiliki KIA sebanyak : 76.044 anak.

Berbagai kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan
  - Kurangnya informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan
  - Kurangnya sumber dan prasarananya untuk perekaman dan pencetakan KTP.
- 3) Persentase OPD dan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan belum ada capaian atau realisasi masih nol, dikarenakan untuk Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan wajib mengacu ISO 27001. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mewajibkan semua lembaga pengguna data kependudukan menerapkan ISO 27001. Penerapan standar ISO 27001 mampu membantu entitas lembaga mendirikan dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) secara optimal. Kepemilikan ISO 27001 dapat menjadi dasar legitimasi keamanan informasi perusahaan yang dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan di Kabupaten Blora belum ada OPD yang mempunyai sertifikat ISO 27001.

### **2.3 Isu-isu Penting Penyeleenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan atas desentralisasi dan tugas perhantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Alcta Catatan Sipil dan Surat Keierangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat besar. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Pernasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum terseluruhnya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ekspresi kepemilikan dokumen kependudukan pada tahun 2023 yang belum memenuhi target.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sangat mempengaruhi tujuan pertama yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi jangka menengah pembangunan Kabupaten Blora.

Sejalan dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Blora, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diantisipasi dengan kesiapan dan ketersediaan berbagai sumber daya. Selain itu, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Isu-isu penting dalam penyeleenggaran tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **f. Optimalisasi Cekungan Data Bina Kependudukan**

Data Kependudukan merupakan kumpulan data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk, memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan, baik

pengembangan pendidikan, kesehatan, perzhanaganan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut diamanatkan di dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, setiap penduduk Kabupaten Blora harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diharapkan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diterbitkan dokumen kependudukan.

Melalui pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Penetapan Sipil setiap hari, data base kependudukan akan terjaga akurasinya.

## 2. Penerapan KTP Elektronik

Pada tahun 2025 penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi kegiatan prioritas sehingga manajemen memahami akan manfaat dan fungsinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendafftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik masuki tahap reguler, dan akan lebih diarahkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah merikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri, berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.
- b. Mencegah terjadinya pernambuan dan KTP ganda.

- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan kota.

### **3. Pencatatan Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base kependudukan yang akurat dan penerbitan akta kelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kesadaran masyarakat di Kabupaten Blora dalam memiliki akta kelahiran sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir Desember 2023, kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun terrealisasi 99,51%. Dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 220.793 yang memiliki akta kelahiran sebanyak 219.702 anak.

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional, bahwa "Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya", terutama untuk usia 0-5 tahun, kegiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan diturjung dengan berbagai pelayanan.

Pelayanan penerbitan akta kelahiran terutama bagi bayi usia 0-60 hari, secara langsung dapat diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah persyaratan terpenuhi secara lengkap. Untuk meningkatkan pencapaian akta kelahiran anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengoptimalkan program Selintas, dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas.

### **4. Belum tertibnya pelaksanaan pemutakhiran data pada Kartu Keluarga**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Blora masih membutuhkan perbaikan lebih. Meskipun angka IPM Kabupaten Blora selalu mengalami peningkatan setiap tahun, namun Kabupaten Blora masih jauh di bawah rata-rata IPM provinsi Jawa Tengah. IPM Kabupaten Blora tahun 2023 sebesar 70,63% meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana tahun 2022 IPM Kabupaten Blora sebesar 69,93%.

Kesadaran masyarakat dalam pemutakhiran data kependudukan terutama jenis pendidikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Karena rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen Indeks Pembangunan Manusia. Masyarakat belum sepenuhnya melaksanakan pemutakhiran data jenis pendidikan yang dimiliki. Untuk itu perlunya sosialisasi pentingnya pemutakhiran data pada KK.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil tahun 2025, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rincangan awal Rencana kerja 2025, Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil mengumumkan anggaran sebesar Rp. 6.457.100.000,- (enam miliar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Pada rancangan akhir rencana Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil memperoleh pagu sebesar Rp. 9.139.000.500,- (sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RPJPD tahun 2025  
Kabupaten Klungkung

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Indikator Kinerja	Proyeksi Anggaran	Locasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran (Rp)	Catatan	Catatan	Catatan
1.	Rancangan Pertumbuhan Urgensi Perekembuhan Desa/Rusun	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase aktivitas kinerja perekembuhan RP Persentase aktivitas kinerja perekembuhan RP	100%	100%	Program Perekembuhan Urgensi Perekembuhan Desa/Rusun	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase aktivitas kinerja perekembuhan RP Persentase aktivitas kinerja perekembuhan RP	100%	8.287.388.000			
2.	Penerapan Dokumentasi Permen dan Perangkat Desa/Rusun	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen permen dan perangkat desa/rusun	4-500	10.000.000	Penerapan Dokumen Permen dan Perangkat Desa/Rusun	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen permen dan perangkat desa/rusun	6.000	6.000.000			
3.	Administrasi Bengkel Desa/Rusun	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase penerapan administrasi kinerja perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	100%	4.474.4286.000	Administrasi Bengkel Desa/Rusun	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase penerapan administrasi kinerja perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	100%	4.474.4286.000			
4.	Penerapan KPI dan Indikator RPJPD	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen hasil perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	3.000	8.280.000.000	Penerapan KPI dan Indikator RPJPD	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen hasil perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	8.280.000	8.280.000.000			
5.	Penerapan Administrasi Perekembuhan Desa/Rusun	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen hasil perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	3.000	20.020.000	Penerapan Administrasi Perekembuhan Desa/Rusun	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Jumlah dokumen hasil perekembuhan desa/rusun berdasarkan KPI dan Indikator RPJPD	3.000	20.020.000			
6.	Administrasi dan Bengkel Desa/Rusun	Bireuk Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase Rancangan Desa/Rusun pada Perangkat Daerah	100%	3.000.000	Administrasi dan Bengkel Desa/Rusun	Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak Desak	Persentase Rancangan Desa/Rusun pada Perangkat Daerah	100%	3.000.000			

	Konsolidasi dan Perbaikan Bantuan Sosial Dinas K SACTI	Diskrik tasi	Jumlah agen di hasil penilaian berangsur maksimal dan hasil konsolidasi penilaian berangsur maksimal (1921)	8 Sept.	2.280.000	Bantuan Sosial Berangsur Tahunan MDP Dinas Kebutuhan	Diskrik tasi	Jumlah agen di hasil penilaian berangsur maksimal dan hasil konsolidasi penilaian berangsur maksimal (520)	4.102.	2.444.000	
4.	Aduan dan Laporan Perangkat Daerah	Diskrik tasi									
	Perbaikan konsolidasi hasil	Diskrik tasi	Perbaikan penilaian maksimal berangsur perangkat daerah	1.000.	300.000	Administrasi Umum Perengaman Dinas	Diskrik tasi	Perbaikan penilaian maksimal berangsur maksimal berangsur (500)	200%	1.400.300.000	
	Perbaikan konsolidasi hasil	Diskrik tasi	Jumlah agen berangsur hasil Bantuan sosial berangsur berangsur dikonsolidasi	1.000.	3.000.000	Perbaikan konsolidasi hasil Lokakarya pengembangan Bantuan Kesehatan	Diskrik tasi	Jumlah agen berangsur hasil lokakarya pengembangan berangsur berangsur dikonsolidasi	1.000%	7.000.000	
	Perbaikan Perbaikan berangsur berangsur hasil	Diskrik tasi	Jumlah agen perbaikan hasil berangsur berangsur yang dikonsolidasi	1.000	70.000.000	Perbaikan perbaikan berangsur berangsur berangsur berangsur yang dikonsolidasi	Diskrik tasi	Jumlah agen perbaikan berangsur berangsur berangsur berangsur yang dikonsolidasi	634.000.000		
	Perbaikan bantuan logistik kesehatan	Diskrik tasi	Jumlah agen bantuan logistik kesehatan dikonsolidasi	5.000.	250.000.000	Perbaikan bantuan logistik kesehatan	Diskrik tasi	Jumlah agen bantuan logistik kesehatan dikonsolidasi	5.000.	800.000.000	
	Perbaikan bantuan menganggaran	Diskrik tasi	Jumlah agen bantuan menganggaran dikonsolidasi	2.0001	5.000.000	Perbaikan bantuan menganggaran perbaikan	Diskrik tasi	Jumlah agen bantuan menganggaran perbaikan dikonsolidasi	2.0001	8.000.000	
	Perbaikan bantuan menganggaran	Diskrik tasi	Jumlah bantuan bantuan menganggaran dikonsolidasi	2.000	2.000.000	Perbaikan bantuan menganggaran perbaikan	Diskrik tasi	Jumlah bantuan bantuan menganggaran perbaikan dikonsolidasi	2.000	9.200.000	

	Perbaikan jalan Kemandirian Baru Kota Samarinda	Ditidak cukup	jumlah lapangan kerja yang dapat kondisional dan berpotensi 1.870	1.1.100	50.000.000	Pembangunan Ruko Kemandirian Baru Kota Samarinda	Ditidak cukup	jumlah lapangan kerja yang dapat kondisional di kota Samarinda	12.100	142.200.000
3.	Bengkel Ban Rung Mitra Bengkel Pemotong Karet dan Penyekat Bantalan	Ditidak cukup	Jumlah tenaga kerja dalam skala pemungutan standart	1.800%	20.000.000	Pengeluaran Bantuan Mitra Kerukau Pemotong Karet dan Penyekat Bantalan	Ditidak cukup	Pembentukan kerumah muka dengan teknologi standart	100%	245.000.000
	Perbaikan jalan di desa dan desa	Ditidak cukup	Jumlah lokasi rambu yang dilakukan	1.000	5.000.000	Perbaikan jalan di desa	Ditidak cukup	Jumlah jalan rambu yang dilakukan	1.000	5.000.000
	Perbaikan jalan pada jalan pertama kali dan jalan pertama kali yang berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah kendaraan datar yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali yang berpotensi	1.000	5.000.000	Perbaikan jalan pertama kali dan jalan pertama kali yang berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah kendaraan datar yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali yang berpotensi	1.000	5.000.000
4.	Perbaikan jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali	1.000%	5.000.000	Perbaikan jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali	100%	5.000.000
	Perbaikan jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	1.2.100	2.500.000	Perbaikan jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali yang berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	1.2.100	4.000.000
	Perbaikan jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	1.2.100	150.000.000	Perbaikan jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	1.2.100	480.1200.000
	Perbaikan jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	4.100	75.000.000	Perbaikan jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	Ditidak cukup	Jumlah jalan pertama kali berpotensi berjalan ke jalan pertama kali berpotensi	4.100	225.000.000

		yang dibutuhkan			yang dibutuhkan karena yang diambil		
	Pembelahan lahan Berkayakan Untuk Gantung	Ditambah 100%	1.2.700,-	817.724.000	Pembentukan lahan Pertambahan lahan Untuk Gantung	Ditambah capai	12.100 300.000.000
7.	Pembentukan lahan Maka Dariah Penyengat Untuk Pertambahan Berasah	Ditambah 100%	1.000,-	37.200.000	Pembentukan lahan Maka Dariah Penyengat Untuk Pertambahan Berasah	Ditambah capai	371.800.000
	Pembentukan lahan Penyekatan lahan, Biaya Penambahan, Pajak, Pembentukan Kendaraan (Lahan Operasional setiap Lahang)	Ditambah 100%	41.000,-	32.200.000	Pembentukan lahan Penyekatan lahan, Biaya Penambahan, Pajak, Pembentukan kendaraan (Lahan Operasional setiap Lahang)	Ditambah capai	341.000 3.000.000.000
	Pembentukan lahan di antara lahan atau di antara lahan dan bangunan bersama	Ditambah 100%	1.400,-	5.200.000	Pembentukan lahan (lahan dan bangunan ganda bersama-sama berdugaan bersama)	Ditambah capai	5.200.000.000
	PROGRAM PENAMBANGAN mineral	Ditambah capai	260.000.000	PROGRAM PENGAPARAH PENGOLAH	Ditambah capai	Catatan kewajiban lain 675.000	260.000.000
8.	Catatan kewajiban KTP Catatan kewajiban KK	70.400,-	1.000%	Catatan kewajiban KK	Catatan kewajiban KK	Catatan kewajiban lain 100%	
9.	Catatan kewajiban RRA Catatan kewajiban RRA	70.400,-	1.000%	Catatan kewajiban RRA	Catatan kewajiban RRA	Catatan kewajiban lain 100%	
1.	Zeraman Pembentukan Pembentukan	Ditambah 100%	1.000.000	200.000.000	Pembentukan Pembentukan Pembentukan	Ditambah capai	10.000 0.000

	Reparatur Preise von Reparaturanlagen Produkten	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	104.000	1.000.000.000	Reparaturanlagen Produktionsvermögen per Produkt	Erlöskost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	284.000	287.500.000
	Produktion, spezifische Kosten des erstellten Dokumentes, ab hier zu keinem produkt herabzuführen	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	103.000	95.390.000	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	102.000	95.390.000
3.	Reparaturanlagen Produktionsvermögen	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	4.400	80.000.000	Reparaturanlagen Produktionsvermögen	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	4.400	82.430.000
	Sociale Kosten Produktionsvermögen	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	2.140	801.000.000	Sociale Kosten Produktionsvermögen	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen	2.140	827.410.000
	PROGRAM REPARATUR 50%	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	98.6 %	134.840.000	PROGRAM REPARATUR 50%	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	98.6 %	251.840.000
1.	Reparatur Produktions typ	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	100 %	76.500.000	Reparatur Produktions typ	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	100 %	80.500.000
	Reparatur produktionsvermögen per Produkt	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	22.000	73.300.000	Reparatur produktionsvermögen per Produkt	Direkt kost typ	reparaturanlagen produktionsvermögen per Produkt	22.000	74.300.000

	Pembatalan data infrastruktur Perbaikan Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan Perbaikan Sipil 0104 dilengkapi	25.000 Transaksi	24.896.000 Pembatalan data infrastruktur Perbaikan Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan Perbaikan Sipil 0104 dilengkapi	25.000 Transaksi	24.896.000
2.	Pembatalan data infrastruktur Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur Sipil	1.2. Lopmen	38.342.000 Pembatalan data infrastruktur Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur Sipil	1.2. Lopmen	38.342.000
	Pembatalan data infrastruktur Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur Sipil	7.4.m Lopmen	35.342.000 Pembatalan data infrastruktur Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur Sipil	7.4.m Lopmen	35.342.000
	Total lalu lalang Perbaikan Infrastruktur Sipil dilengkapi	Direktur 0104	Lurah Kecamatan lalu lalang	1.3.p Lopmen	33.338.000 Pembatalan data infrastruktur Sipil	Direktur 0104	Lurah Kecamatan lalu lalang	1.3.p Lopmen	33.338.000
	Pengeluaran Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Pengeluaran DPO dan kebutuhan pengguna yang memerlukan data kependidikan	3.m Lopmen	338.656.000 Pengeluaran Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Pengeluaran DPO dan kebutuhan pengguna yang memerlukan data kependidikan	3.m Lopmen	338.656.000
3.	Pengeluaran Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Database yang akurat kependidikan	3.m Lopmen	313.338.000 Pengeluaran Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Database yang akurat kependidikan	3.m Lopmen	313.338.000
	Total pembatalan pembatalan Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Lurah Kecamatan Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	1.4.p Lopmen	278.602.000 Total pembatalan pembatalan Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	Direktur 0104	Lurah Kecamatan Infrastruktur Adminstrasi dan Kependidikan	1.4.p Lopmen	278.602.000
	Pembatalan Data infrastruktur yang akurat dan dapat diolah dengan baik	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur yang akurat dan dapat diolah dengan baik	1.4.m Lopmen	40.200.000 Pembatalan Data infrastruktur yang akurat dan dapat diolah dengan baik	Direktur 0104	Lurah Kecamatan infrastruktur yang akurat dan dapat diolah dengan baik	1.4.m Lopmen	40.200.000

	Proyeksi Pengeluaran Pemerintah Daerah	Birokrat negatif	Pengeluaran DPLT dan kondisi yang menimbulkan profit kelebihan	81.300.000	Program Pengeluaran Profit Kependidikan	Birokrat negatif	Program Pengeluaran kondisi yang menimbulkan profit kelebihan	81.300.000
1.	Perbaikan Profil Kependidikan	Birokrat negatif	Kondisi diketahui yang dilakukan	2.400	Perbaikan Profil Kependidikan	Birokrat negatif	Kondisi diketahui yang dilakukan	2.400
	Perbaikan Profil Kependidikan	Birokrat negatif	Kondisi diketahui yang dilakukan	1.600	Perbaikan Profil Kependidikan	Birokrat negatif	Kondisi diketahui yang dilakukan	1.600

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependidikan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menyerahkan dokumen kependidikan atas terjadinya peristiwa kependidikan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Blora

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penerapan administrasi kependudukan pada tahun 2023 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Renovasi Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kefahirannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik menasuki tahap pelayanan reguler. Dimulai pada tahun 2012 dengan langkah-langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, termasuk wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan reguler kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran sekeruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "**Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel**", dengan tujuan "**Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pola kerja dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil**".

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akurat dan akurat

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **1. Tujuan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
- 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 5) Meningkatkan penataan dokumen kependudukan

#### **2. Sasaran Renja Perangkat Daerah**

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional
- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 5) Melengkapi pergejalaan dokumen kependudukan

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah :



#### Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frasa yaitu:

##### 1. Sesarengan Mbangun Blora

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat difasilitasi secara bersama-sama melalui dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

##### Sesarengan Mbangun Blora

1

Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai kebersamaan dalam meningkatkan antara pemerintah, masyarakat dan relasi

2

Berkembangnya semangat kebersamaan dalam memfasilitasi dan memaju pertumbuhan

3

Berkembangnya semangat kebersamaan dalam memfasilitasi dan memaju hasil pembangunan

##### 2. Unggul

Unggul dapat dimulai sebagai kordinasi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

## Unggul

1

Kondisi ekosistem masyarakat yang berkembang dan berdaya berdasarkan potensi lokal

2

Kabupaten Blora yang unggul di Tingkat Provinsi dan Nasional

### 3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan kooperatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

## Berdaya Saing

1

Kemampuan daerah dalam mengelola sumber dan proses, daya tarik dan agresivitas pada sektor ekonomi, sosial dan budaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menumbuhkan kekayaan daerah guna memperbaiki masyarakat.

2

Kemampuan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi bermasyarakat dan inovasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **"Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bernalih dan akuntabel"**, dengan tujuan **"Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil"**.

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan alita catatan sipil
3. Meningkatnya kualitas database kependudukan dan pencatatan sipil yang valid, akuntabel dan akurasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dibatasi pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tujuan.

Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbit其实nya berbagai regulasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
2. Meningkatnya pernafasan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pemahaman database Kependudukan

Ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator terutama untuk cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), karena pelayanan jemput bola difokuskan pada pelayanan perelemanan KTP Elektronik bagi pemula di sekolah-sekolah dalam rangka mendukung pelaksanaan Pilg dan Pilpres.

Guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora telah menciptakan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi, dimana setiap arsip pelayanan penerbitan dokumen kependudukan akan tersimpan dalam bentuk digital dengan jaringan cloud computing. Disamping itu untuk memberikan kemudahan akses layanan telah dilaksanakan pelayanan online untuk semua layanan melalui website dan rencana pelayanan dokumen kependudukan terbit di kecamatan dengan inovasinya (Doku Blora).

Program dan kegiatan pada tahun 2025, dikelompokan ke dalam Program/Kegiatan Rutin SKPD dan Program/Kegiatan Urusan Wajib.

#### 4.1 Rencana Program dan Kegiatan :

Rencana program/kegiatan/sub kegiatan Renja Perangkat Daerah: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2025 sebagai berikut :

##### A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
  - a. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Penyediaan Administrasi Pelepasan/Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kuning

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Bahan Logistik Kantor
  - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Basah dan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
- a. Pengadaan Mebel
  - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Sunti Masyarakat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **B. Program Pendaftaran Penduduk**

- 1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
  - a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk.

#### **C. Program Pencatatan Sipil**

- 1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Fenting
  - b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
- 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyelemparan Pemantauan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
  - b. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

#### **D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Pemfasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- b. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

#### E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari:
  - a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain.

Pagu anggaran rencana program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada rancangan awal Renja tahun 2025 sebesar 6.457.100.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten. Pada RKPD Kabupaten Blora Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 9.139.500.000 (sembilan miliar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Rincianan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah pada rancangan akhir Renja Tahun 2025 (hasil input di SIPD-RI sebagai berikut :



No	Name	Information about the subject											
		Age	Gender	Education level									
1	Joko	28	Male	High school	30	Male	High school	32	Male	High school	34	Male	High school
2	Yuni	25	Female	High school	27	Female	High school	29	Female	High school	31	Female	High school
3	Rahmat	32	Male	High school	34	Male	High school	36	Male	High school	38	Male	High school
4	Wulan	29	Female	High school	31	Female	High school	33	Female	High school	35	Female	High school
5	Asep	35	Male	High school	37	Male	High school	39	Male	High school	41	Male	High school
6	Yanti	31	Female	High school	33	Female	High school	35	Female	High school	37	Female	High school
7	Triyono	38	Male	High school	40	Male	High school	42	Male	High school	44	Male	High school
8	Widya	34	Female	High school	36	Female	High school	38	Female	High school	40	Female	High school
9	Surjana	39	Male	High school	41	Male	High school	43	Male	High school	45	Male	High school
10	Yati	36	Female	High school	38	Female	High school	40	Female	High school	42	Female	High school
11	Triyono	38	Male	High school	40	Male	High school	42	Male	High school	44	Male	High school
12	Widya	34	Female	High school	36	Female	High school	38	Female	High school	40	Female	High school
13	Surjana	39	Male	High school	41	Male	High school	43	Male	High school	45	Male	High school
14	Yati	36	Female	High school	38	Female	High school	40	Female	High school	42	Female	High school

No.	Name	Information about the individual						Information about the individual's family members						Information about the individual's social environment					
		Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment	Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment	Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment	Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment	Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment	Relationship to the individual	Relationship to the individual's family members	Relationship to the individual's social environment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	1																		
2	2																		
3	3																		
4	4																		
5	5																		
6	6																		
7	7																		
8	8																		
9	9																		
10	10																		
11	11																		
12	12																		
13	13																		
14	14																		
15	15																		
16	16																		
17	17																		
18	18																		
19	19																		

No.	Name	Project description			Project duration			Project costs			Project outcomes			Project evaluation		
		Start date	End date	Duration	Start date	End date	Duration	Budget	Actual costs	Variance	Completion	Success	Impact	Feedback	Overall rating	
<b>Project A: Software Development</b>																
1	Software Dev Team	2023-01-01	2023-06-30	5 months	2023-01-01	2023-06-30	5 months	\$100,000	\$95,000	-\$5,000	100%	High	Positive impact	Good feedback	Excellent	
2	Hardware Procurement	2023-02-01	2023-04-15	3 months	2023-02-01	2023-04-15	3 months	\$50,000	\$48,000	-\$2,000	100%	Medium	On time delivery	Good value	Good	
3	Data Migration	2023-03-01	2023-05-01	2 months	2023-03-01	2023-05-01	2 months	\$30,000	\$28,000	-\$2,000	100%	Low	Smooth transition	Cost-effective	Good	
4	Market Research	2023-04-01	2023-05-15	1 month	2023-04-01	2023-05-15	1 month	\$10,000	\$9,000	-\$1,000	100%	Very Low	Useful insights	Relevant findings	Good	
5	Training Program	2023-05-01	2023-06-15	1 month	2023-05-01	2023-06-15	1 month	\$15,000	\$14,000	-\$1,000	100%	Very Low	Improved skills	Positive feedback	Good	
6	Customer Support	2023-06-01	2023-06-30	1 month	2023-06-01	2023-06-30	1 month	\$5,000	\$4,500	-\$500	100%	Very Low	Responsive	High satisfaction	Good	
7	Marketing Campaign	2023-07-01	2023-07-31	1 month	2023-07-01	2023-07-31	1 month	\$20,000	\$18,000	-\$2,000	100%	Very Low	High engagement	Positive ROI	Good	
8	Infrastructure Upgrade	2023-08-01	2023-09-01	1 month	2023-08-01	2023-09-01	1 month	\$40,000	\$38,000	-\$2,000	100%	Very Low	Stable performance	Cost savings	Good	
9	Partnership Expansion	2023-09-01	2023-10-01	1 month	2023-09-01	2023-10-01	1 month	\$30,000	\$28,000	-\$2,000	100%	Very Low	Strong collaboration	Shared success	Good	
10	Product Launch	2023-10-01	2023-10-31	1 month	2023-10-01	2023-10-31	1 month	\$50,000	\$48,000	-\$2,000	100%	Very Low	Positive reception	High sales	Excellent	
11	Post-Launch Support	2023-11-01	2023-11-30	1 month	2023-11-01	2023-11-30	1 month	\$10,000	\$9,000	-\$1,000	100%	Very Low	Responsive support	High satisfaction	Good	
12	Final Audit	2023-12-01	2023-12-31	1 month	2023-12-01	2023-12-31	1 month	\$5,000	\$4,500	-\$500	100%	Very Low	No major issues	Positive report	Good	
13	Overall Project Summary	Project A was a success, meeting all key milestones and exceeding budget expectations.			The team worked effectively despite challenges, particularly in the initial phases.			Total costs were \$95,000, which is \$5,000 below the original budget of \$100,000.			Key outcomes include a new software system, improved infrastructure, and expanded partnerships.			Feedback from stakeholders was generally positive, with high satisfaction levels across all areas.		

A74

No.	Name	Probability													
		Sample Space	Event												
1.	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1
2.	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
3.	3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
4.	4	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
5.	5	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
6.	6	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6	1
7.	7	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7	1
8.	8	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1	8	1
9.	9	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1
10.	10	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1
11.	11	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1	11	1
12.	12	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1	12	1
13.	13	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1	13	1
14.	14	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1	14	1
15.	15	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1
16.	16	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1	16	1
17.	17	17	1	17	1	17	1	17	1	17	1	17	1	17	1
18.	18	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1	18	1
19.	19	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1
20.	20	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20	1
21.	21	21	1	21	1	21	1	21	1	21	1	21	1	21	1
22.	22	22	1	22	1	22	1	22	1	22	1	22	1	22	1
23.	23	23	1	23	1	23	1	23	1	23	1	23	1	23	1
24.	24	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1	24	1
25.	25	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1
26.	26	26	1	26	1	26	1	26	1	26	1	26	1	26	1
27.	27	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1	27	1
28.	28	28	1	28	1	28	1	28	1	28	1	28	1	28	1
29.	29	29	1	29	1	29	1	29	1	29	1	29	1	29	1
30.	30	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1	30	1
31.	31	31	1	31	1	31	1	31	1	31	1	31	1	31	1
32.	32	32	1	32	1	32	1	32	1	32	1	32	1	32	1
33.	33	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1
34.	34	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1
35.	35	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1	35	1
36.	36	36	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	1	36	1
37.	37	37	1	37	1	37	1	37	1	37	1	37	1	37	1
38.	38	38	1	38	1	38	1	38	1	38	1	38	1	38	1
39.	39	39	1	39	1	39	1	39	1	39	1	39	1	39	1
40.	40	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1	40	1
41.	41	41	1	41	1	41	1	41	1	41	1	41	1	41	1
42.	42	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1	42	1
43.	43	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1	43	1
44.	44	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1	44	1
45.	45	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1	45	1
46.	46	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1	46	1
47.	47	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1	47	1
48.	48	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1	48	1
49.	49	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1	49	1
50.	50	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1	50	1
51.	51	51	1	51	1	51	1	51	1	51	1	51	1	51	1
52.	52	52	1	52	1	52	1	52	1	52	1	52	1	52	1
53.	53	53	1	53	1	53	1	53	1	53	1	53	1	53	1
54.	54	54	1	54	1	54	1	54	1	54	1	54	1	54	1
55.	55	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1	55	1
56.	56	56	1	56	1	56	1	56	1	56	1	56	1	56	1
57.	57	57	1	57	1	57	1	57	1	57	1	57	1	57	1
58.	58	58	1	58	1	58	1	58	1	58	1	58	1	58	1
59.	59	59	1	59	1	59	1	59	1	59	1	59	1	59	1
60.	60	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1	60	1
61.	61	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1	61	1
62.	62	62	1	62	1	62	1	62	1	62	1	62	1	62	1
63.	63	63	1	63	1	63	1	63	1	63	1	63	1	63	1
64.	64	64	1	64	1	64	1	64	1	64	1	64	1	64	1
65.	65	65	1	65	1	65	1	65	1	65	1	65	1	65	1
66.	66	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1	66	1
67.	67	67	1	67	1	67	1	67	1	67	1	67	1	67	1
68.	68	68	1	68	1	68	1	68	1	68	1	68	1	68	1
69.	69	69	1	69	1	69	1	69	1	69	1	69	1	69	1
70.	70	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1	70	1
71.	71	71	1	71	1	71	1	71	1	71	1	71	1	71	1
72.	72	72	1	72	1	72	1	72	1	72	1	72	1	72	1
73.	73	73	1	73	1	73	1	73	1	73	1	73	1	73	1
74.	74	74	1	74	1	74	1	74	1	74	1	74	1	74	1
75.	75	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1	75	1
76.	76	76	1	76	1	76	1	76	1	76	1	76	1	76	1
77.	77	77	1	77	1	77	1	77	1	77	1	77	1	77	1
78.	78	78	1	78	1	78	1	78	1	78	1	78	1	78	1
79.	79	79	1	79	1	79	1	79	1	79	1	79	1	79	1
80.	80	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1	80	1
81.	81	81	1	81	1	81	1	81	1	81	1	81	1	81	1
82.	82	82	1	82	1	82	1	82	1	82	1	82	1	82	1
83.	83	83	1	83	1	83	1	83	1	83	1	83	1	83	1
84.	84	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1	84	1
85.	85	85	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85	1	85	1
86.	86	86	1	86	1	86	1	86	1	86	1	86	1	86	1
87.	87	87	1	87	1	87	1	87	1	87	1	87	1	87	1
88.	88	88	1	88	1	88	1	88	1	88	1	88	1	88	1
89.	89	89	1	89	1	89	1	89	1	89	1	89	1	89	1
90.	90	90	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90	1	90	1
91.	91	91	1	91	1	91	1	91	1	91	1	91	1	91	1
92.	92	92	1	92	1	92	1	92	1	92	1	92	1	92	1
93.	93	93	1	93	1	93	1	93	1	93	1	93	1	93	1
94.	94	94	1	94	1	94	1	94	1	94	1	94	1	94	1
95.	95	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1	95	1
96.	96	96	1	96	1	96	1	96	1	96	1	96	1	96	1
97.	97	97	1	97	1	97	1	97	1	97	1	97	1	97	1
98.	98	98	1	98	1	98	1	98	1	98	1	98	1	98	1
99.	99	99	1	99	1	99	1	99	1	99	1	99	1	99	1
100.	100	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1

A74

No.	Name	Detailed description of the relevant financial instrument						Total amount of cash consideration to be paid	Interest rate	Maturity date	Description of cash consideration to be paid
		Initial fair value of the financial instrument	Carrying amount of the financial instrument	Revaluation amount	Interest income	Interest expense	Change in fair value				
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No.	Name	Information about the production of the product								Information about the consumption of the product							
		Product ID	Product name	Product description	Product type	Product category	Product specification	Product unit	Product quantity	Consumption ID	Consumption name	Consumption description	Consumption type	Consumption category	Consumption specification	Consumption unit	Consumption quantity
1	Product A	PA001	Product A	Product A is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CA001	Consumption A	Consumption A is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
2	Product B	PB002	Product B	Product B is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CB002	Consumption B	Consumption B is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
3	Product C	PC003	Product C	Product C is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CC003	Consumption C	Consumption C is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
4	Product D	PD004	Product D	Product D is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CD004	Consumption D	Consumption D is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
5	Product E	PE005	Product E	Product E is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CE005	Consumption E	Consumption E is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
6	Product F	PF006	Product F	Product F is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CF006	Consumption F	Consumption F is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
7	Product G	PG007	Product G	Product G is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CG007	Consumption G	Consumption G is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
8	Product H	PH008	Product H	Product H is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CH008	Consumption H	Consumption H is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
9	Product I	PI009	Product I	Product I is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CI009	Consumption I	Consumption I is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100
10	Product J	PJ010	Product J	Product J is a basic product.	Physical Product	Electronics	1.0	Unit	100	CI010	Consumption J	Consumption J is a basic consumption.	Physical Consumption	Electronics	1.0	Unit	100



ID	Name	Current status of the project		Project description		Project duration		Project cost		Project team		Project outcome	
		Phase	Description	Start Date	End Date	Duration	Cost	Budget	Actual Cost	Team Size	Team Lead	Completion Status	Impact
P001	Project Alpha	Planning	Initial planning phase	2023-01-01	2023-02-15	1 month	\$100,000	\$100,000	\$100,000	5	John Doe	On Track	High Impact
P002	Project Beta	Design	System design phase	2023-02-01	2023-03-15	1 month	\$150,000	\$150,000	\$150,000	7	Jane Smith	On Track	Medium Impact
P003	Project Gamma	Development	Backend development phase	2023-03-01	2023-04-15	1 month	\$200,000	\$200,000	\$200,000	9	Mike Johnson	On Track	High Impact
P004	Project Delta	Testing	Unit testing phase	2023-04-01	2023-05-15	1 month	\$100,000	\$100,000	\$100,000	5	Sarah Lee	On Track	Medium Impact
P005	Project Epsilon	Deployment	Deployment phase	2023-05-01	2023-06-15	1 month	\$50,000	\$50,000	\$50,000	3	David White	On Track	Low Impact
P006	Project Zeta	Monitoring	Post-deployment monitoring	2023-06-01	2023-07-15	1 month	\$20,000	\$20,000	\$20,000	2	Emily Black	On Track	Low Impact
P007	Project Eta	Review	Final review phase	2023-07-01	2023-08-15	1 month	\$30,000	\$30,000	\$30,000	4	Alex Green	On Track	Medium Impact
P008	Project Theta	Archiving	Archiving phase	2023-08-01	2023-09-15	1 month	\$10,000	\$10,000	\$10,000	1	Olivia Blue	On Track	Low Impact
P009	Project Iota	Planning	Initial planning phase	2023-09-01	2023-10-15	1 month	\$100,000	\$100,000	\$100,000	5	John Doe	On Track	High Impact
P010	Project Kappa	Design	System design phase	2023-10-01	2023-11-15	1 month	\$150,000	\$150,000	\$150,000	7	Jane Smith	On Track	Medium Impact
P011	Project Lambda	Development	Backend development phase	2023-11-01	2023-12-15	1 month	\$200,000	\$200,000	\$200,000	9	Mike Johnson	On Track	High Impact
P012	Project Mu	Testing	Unit testing phase	2023-12-01	2024-01-15	1 month	\$100,000	\$100,000	\$100,000	5	Sarah Lee	On Track	Medium Impact
P013	Project Nu	Deployment	Deployment phase	2024-01-01	2024-02-15	1 month	\$50,000	\$50,000	\$50,000	3	David White	On Track	Low Impact
P014	Project Xi	Monitoring	Post-deployment monitoring	2024-02-01	2024-03-15	1 month	\$20,000	\$20,000	\$20,000	2	Emily Black	On Track	Low Impact
P015	Project Omicron	Review	Final review phase	2024-03-01	2024-04-15	1 month	\$30,000	\$30,000	\$30,000	4	Alex Green	On Track	Medium Impact
P016	Project Pi	Archiving	Archiving phase	2024-04-01	2024-05-15	1 month	\$10,000	\$10,000	\$10,000	1	Olivia Blue	On Track	Low Impact

Nr.	Name	Länder und Gemeinden (Siedlungen)			Wasserfläche	Waldfläche	Weinbergsfläche	Gesamtfeldgröße
		Fläche (ha)	Fläche (ha)	Fläche (ha)				
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74	74	74	74
75	75	75	75	75	75	75	75	75
76	76	76	76	76	76	76	76	76
77	77	77	77	77	77	77	77	77
78	78	78	78	78	78	78	78	78
79	79	79	79	79	79	79	79	79
80	80	80	80	80	80	80	80	80
81	81	81	81	81	81	81	81	81
82	82	82	82	82	82	82	82	82
83	83	83	83	83	83	83	83	83
84	84	84	84	84	84	84	84	84
85	85	85	85	85	85	85	85	85
86	86	86	86	86	86	86	86	86
87	87	87	87	87	87	87	87	87
88	88	88	88	88	88	88	88	88
89	89	89	89	89	89	89	89	89
90	90	90	90	90	90	90	90	90
91	91	91	91	91	91	91	91	91
92	92	92	92	92	92	92	92	92
93	93	93	93	93	93	93	93	93
94	94	94	94	94	94	94	94	94
95	95	95	95	95	95	95	95	95
96	96	96	96	96	96	96	96	96
97	97	97	97	97	97	97	97	97
98	98	98	98	98	98	98	98	98
99	99	99	99	99	99	99	99	99
100	100	100	100	100	100	100	100	100

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 jatu 1 tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2025 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. RKPD Tahun 2025 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora Tahun 2005-2025, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang diamanatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dalam Rensda serta memperhatikan skala prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seusai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

BUPATI BLORA,



ARIKHO SOHMAN



# RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2026

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
JL. RAYA BLORA - CEPU KM. 5

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-2
1.3 Makrid dan Tujuan .....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-5
BAB II EVALUASI PELAKUKAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Cepatian Renstra OPD .....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelaksanaan OPD .....	II-2
2.3 Inisiatif Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	II-10
2.4 Revisi terhadap Rancangan Awal RSKPD Tahun 2026 .....	I-15
2.5 Penilaian Utusan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	II-21
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN .....	III-1
3.1 Pelaksanaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi .....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Raja OPD .....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	IV-1
4.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	IV-3
BAB V PENUTUP .....	V-1

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah mempermudah Rahmat dan Keranik-Nya, sehingga dapat menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026.

Dengan disusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang Pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan proses pelaksanaan program/kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Blora "Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel".

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan. Berkaitan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk perbaikan/pemperbaikan selanjutnya.

**KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA**

Drs. DJOKO SULISTIYONO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197105301992081004

**RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2026**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rancana kerja (renja) perangkat daerah memuat program, kgiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah, rancana kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang diturunkan berpedoman kepada rancana strategis (renstra) perangkat daerah dan Rancana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2026 diturunkan untuk

menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan kegiatan yang diwartai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD terus dengan tugas pokok dan fungsiya. Hal ini sebagai implementasi dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, metacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga wajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomaklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, yang diturunkan dengan berpedoman kepada Ranstra OPD dan mengacu kepada RXPD.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2025 menjawarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora yang mengacu pada Rencana Strategik (Ranstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dan diturunkan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyalenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nominalisasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud diturunkannya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Diberikannya dokumen perencanaan pembangunan Urusan Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2026 yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.
2. Diremukannya pedoman perencanaan pembangunan Urusan Kependidikan dan Catatan Sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengvaluasi kinerja pembangunan urusan kependidikan dan pendidikan sipil tahun sebelumnya (tahun 2024) serta merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2026.

2. Mengarahkan pencapaian visi dan misi Kabupaten Biora ke dalam rancangan strategi program/kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menyusun kebijakan program/kegiatan dan indikasi kegiatan tahun 2026.
4. Meruji/diskusi kebijakan program/kegiatan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan seluruh program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landskap Muncul
- 1.3. Makrid dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Yang Lalu dan Capaian Reuniwa Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelesaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penilaian Utama Program dan Kegiatan Masyarakat

##### BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

- 3.1. Tujuan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Raja Perangkat Daerah

##### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

- ###### DAERAH
- 4.1. Program dan Kegiatan

##### BAB V PENUTUP

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

### TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan program/kegiatan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 dilaksanakan melalui program/kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam Program/Kegiatan Non Urusan dan Program/Kegiatan Urusan Wajib.

Program/kegiatan urusan wajib dilaksanakan melalui 4 Program, 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan, dan Program Non Urusan OPD dilaksanakan melalui 6 kegiatan dan 16 sub kegiatan.

Adapun rincian evaluasi pelaksanaan renjana kerja tahun 2024, sebagai berikut :

##### 1) Program Rutin

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
  - a) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah, dengan sub Kegiatan :
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN terealisasi 100%.
    - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dengan indikator jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN 8 dokumen terealisasi 100%.
  - b) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD, dengan indikator jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi barang milik daerah SKPD dengan target 4 laporan terealisasi 100%.
  - c) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub Kegiatan :
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, indikator jumlah paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 100%.
    - Penyediaan bahan logistik kantor, dengan indikator jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 2 paket terealisasi 100%.
    - Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan, dengan indikator jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 1 paket terealisasi 100%.

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-Undangan, dengan indikator jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target 80 dokumen terrealisasi 100%.
  - Panyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan indikator jumlah laporan panyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub Kegiatan :
- Pengadaan mebel, indikator jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 1 paket terrealisasi 100%.
- e) Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, indikator jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
  - Penyediaan jasa persalinan dan perlengkapan kantor dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa dan perlengkapan kantor dengan target 4 laporan terrealisasi 100%.
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dengan indikator jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target 12 laporan 100% terrealisasi 100%.
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, dengan indikator jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya dengan target 40 unit terrealisasi 100%.
  - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 1 unit terrealisasi 100%.

**2) Program/Kegiatan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- **Program Pendaftaran Penduduk**

- a) *Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk*, dengan sub kegiatan :
- Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk, dengan indikator jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan target 12 laporan terrealisasi 100%.
  - Panarbeitan dokumen stat hasil pelaporan peristiwa kependudukan, dengan indikator jumlah laporan panarbeitan dokumen stat hasil pelaporan peristiwa kependudukan dengan target 164.000 dokumen terrealisasi 143.786 dokumen.

- **Program Pencatatan Sipil**

- a) *Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil*, dengan sub kegiatan :
- Peningkatan pelayanan dalam pelayanan pencatatan sipil, dengan indikator jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan 20.000 akta terrealisasi 18.494 akta.

b) *Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*

- Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil dengan indikator jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil dengan target 2 dokumen terrealisasi 100%

- **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

a) *Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*, dengan sub kegiatan :

- Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan, dengan indikator jumlah laporan hasil facilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan target 2 laporan terrealisasi 2 laporan.
- Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan dengan indikator kisanya jumlah 1 data kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dengan target 1 data terrealisasi 100%.

- **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

a) *Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan*, dengan sub kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain, dengan indikator jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan target 1 dokumen terrealisasi 100%

Tabel II.1  
Ketepatan dan Mean Reliabilitas Kunci Penyelesaian  
Rumusan Kasus Penyelesaian Sistematis Tahun 2008  
Dilengkapi Dengan

Kode	Alokasi dan Pembentukan kunci Penyelesaian	Penamaan dan Bentuk/Carakan kunci	Jenis Soal Matematik Penyelesaian Sistematis Penyelesaian Sistematis	Jumlah Soal Penyelesaian Sistematis Penyelesaian Sistematis	Tepat dan Baiknya Ciri-ciri kunci dan karakteristiknya			Penerapan dalam Penyelesaian Sistematis	Penerapan dalam Penyelesaian Sistematis Penyelesaian Sistematis
					Tepat dan Baiknya Ciri-ciri kunci dan karakteristiknya	Jumlah Soal Penyelesaian Sistematis Penyelesaian Sistematis	Mean Nilai Soal Penyelesaian Sistematis Penyelesaian Sistematis		
4	4	4	4	4	0	0	0	4	4
5.	Pembuktian matematis menggunakan rumus	Pembuktian matematis menggunakan rumus	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
6.	penyelesaian menggunakan rumus	Penyelesaian menggunakan rumus	4400	4400	4400	4400	4400	4400	4400
	penyelesaian dengan rumus	Penyelesaian dengan rumus	00	00	00	00	00	00	00
	Penyelesaian menggunakan rumus	Penyelesaian menggunakan rumus	00	00	00	00	00	00	00

4	Geplandt Bouw 2019 Gebruikbaarheid Vlaanderen	Belangrijkste voorwaarde voor de uitvoering van de bouw actie.	100	100	100	100	100	100
	Gebruikbaarheid Bouw Vlaanderen 2019	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied en materiaal.	0	0	1	1	0	0
5	Geplandt Bouw 2019 Gebruikbaarheid Vlaanderen	Belangrijkste voorwaarde voor de uitvoering van de bouw actie.	100	100	100	100	100	100
	Gebruikbaarheid Vlaanderen Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwoordelij keurmerk	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied en materiaal	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied en materiaal.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied en materiaal en toegang tot grondgebied	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied en materiaal en toegang tot grondgebied.	0	0	0	0	0	0
6	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk	Belangrijkste voorwaarde voor de uitvoering van de bouw actie.	100	100	100	100	100	100
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied en materiaal	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied en materiaal.	0	0	0	0	0	0
	Gebruikbaarheid Vlaams overheidsbestuur Bouwverantwo rdelijk keurmerk en gebruikbaar van grondgebied en materiaal en toegang tot grondgebied	Uitdrukkelijk moet gebouwd worden met gebruik van het beschikbare grondgebied en materiaal en toegang tot grondgebied.	0	0	0	0	0	0

	Номером или Номером ИЧУМ-кодом	Срок ведения определенных записей ИЧУМ-кодом или документом	70	40	10	14	30	70	40	10	14
4.	Приказом №109 от 09.09.2009 Министерства Юстиции Республики Беларусь	Приказом №109 от 09.09.2009 установленный	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
	записи о: имени, фамилии, отчестве, дате рождения, месте рождения, личности, состоящем в семье или бывшем супруге	имени, фамилии для записей о месте рождения и супружеской жизни	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	личности, состоящем в семье или бывшем супруге	личности, состоящем в семье или бывшем супруге	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5.	Приказом Министерства финансов	Приказом №109 от 09.09.2009 установленный	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000
	записи о: имени, фамилии, отчестве, дате рождения	имени, фамилии для записей о месте рождения и супружеской жизни	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	личности, состоящем в семье или бывшем супруге	личности, состоящем в семье или бывшем супруге	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6.	Приказом Министерства финансов	Приказом №109 от 09.09.2009 установленный	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	записи о: имени, фамилии, отчестве, дате рождения	имени, фамилии для записей о месте рождения и супружеской жизни	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7.	Приказом Министерства финансов №109 от 09.09.2009 установленный	Приказом №109 от 09.09.2009 установленный	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000
	записи о: имени, фамилии, отчестве, дате рождения	имени, фамилии для записей о месте рождения и супружеской жизни	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
8.	Приказом Министерства финансов №109 от 09.09.2009 установленный	Приказом №109 от 09.09.2009 установленный	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
	записи о: имени, фамилии, отчестве, дате рождения	имени, фамилии для записей о месте рождения и супружеской жизни	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

5	Банкноты и монеты ЦБР	Сумма номиналов всех видов банкнот и монет ЦБР	10	9	7	4	800	8	8	10
6	Банкноты и монеты ЦБР, выданные в кредитные учреждения	Сумма номиналов всех видов банкнот и монет ЦБР, выданных в кредитные учреждения	10	9	7	4	800	8	8	10
7	Наличные денежные средства центральных государственных учреждений	Сумма ЦБР, выданная центральными государственными учреждениями	10	9	7	4	800	8	8	10
8	Банкноты и монеты ЦБР, выданные кредитным учреждениям	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям	100	90	60	30	800	170	170	10
9	Банкноты и монеты ЦБР, выданные кредитным учреждениям из расчета	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям из расчета	100	90	60	30	800	170	170	10
10	Банкноты и монеты ЦБР, выданные кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений	10	9	7	4	800	8	8	10
11	Банкноты и монеты ЦБР, выданные кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений из расчета	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений из расчета	10	9	7	4	800	8	8	10
12	Наличные денежные средства кредитных учреждений	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям	100	9000	6000	3000	8000	1800	1800	1000
13	Банкноты и монеты ЦБР, выданные кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений из расчета наименьшего количества кредитных учреждений	Сумма ЦБР, выданная кредитным учреждениям из расчета наименьшего количества кредитных учреждений из расчета наименьшего количества кредитных учреждений	10	9	7	4	800	8	8	10

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Rancana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja yang tertuang pada Kinerja Utama (KU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Basisan	Indikator Kinerja	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Target 2025	Target 2026
1.	Tujuan :							
	Terwujudnya kendali yang baik dan akuntabel	Nilai Sifat Perangkat Daerah	70	70	72	74	76	80
2.	Basisan :							
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum pendukung dalam rangka pencapaian nilai Sifat	Persentase pelayanan administrasi umum pendukung yang mencapai nilai Sifat	100	100	100	100	100	100
3.	Tujuan :							
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	88	88,2	88,4	88,6	88,8	90
	Basisan							
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Colegian layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	95	95	95,08	95,16	95,24	95,32

Tabel 3.3  
Persebaran Wilayah Pelaku dan Penerima Dana Pengembangan Tingkat  
Makrogejala Wilayah Tengah (Bantuan pada 2001/2002)

No.	Program	Kegiatan	Pengalihdistribusi (%)	Sumber Dana (%)	Anggaran (%)	Ruang Letak (%)	Ruang Terpadu (%)
1.	Program Pembangunan Infrastruktur dan Perekonomian	Kerjasama pemerintah dengan swasta	100	100	100	100	100
2.	Program Kesejahteraan Sosial	Saluran Anggaran 1	49,74	99,99	100,00	100,00	100,00
		Saluran Anggaran 2	14,44	100	100	100	100
		Saluran Anggaran 3	35,82	99,71	99,81	99,9	99,9
3.	Program Kesehatan	Kerjasama anggaran dan swastateruskan oleh swasta	100	100,00	100,00	100	100,00
4.	Program Pengelolaan Infrastruktur dan Perekonomian Agroindustri	Penerapan RDP dan LPPM bagi masyarakat dan pengembangan agroindustri	55	5	5	50	5
5.	Program Pengelolaan Sertifikat Tanah	Penerapan RDP dan LPPM bagi masyarakat dan pengembangan agroindustri	55	100	100	45	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada indikator kinerja yang belum memenuhi target. Kurangnya keberhasilan pencapaian indikator tersebut antara lain :

- 1) Masih ada penduduk yang belum mengurus akta kelahiran anak.  
Realisasi capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun pada tahun 2024 sebesar 99,55%. Dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak : 218.918 yang sudah memiliki akta kelahiran sebanyak 217.929 dan yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak KTP sebanyak 989 anak.
- 2) Cakupan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) pada tahun 2024, tercapai 65,74%, dari jumlah anak usia 0-17 tahun : sebanyak 206.656 anak yang memiliki KIA sebanyak : 131.714 anak dan yang belum memiliki KIA sebanyak : 74.942 anak.

Beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja disebabkan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya dokumen kependudukan
  - Kurangnya informasi terkait pelayanan dokumen kependudukan
  - Kurangnya sarana dan prasarana untuk pencetakan KTP dan KIA dikarenakan ada beberapa peralatan yang sudah rusak.
- 3) Persentase OPD dan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan belum ada capaian atau realisasi masih nol, dikarenakan untuk Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan wajib memiliki sertifikat ISO 27001. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mewajibkan semua lembaga pengguna data kependudukan mempersiapkan ISO 27001. Penerapan standar ISO 27001 mampu membantu unitas lembaga membangun dan memelihara sistem managemen keamanan informasi (SMKI) secara optimal. Kepemilikan ISO 27001 dapat menjadi dasar legitimasi keamanan informasi perusahaan yang dapat digunakan baik secara internal maupun eksternal. Sedangkan di Kabupaten Blora belum ada OPD yang memiliki sertifikat ISO 27001.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan arsi-

desentralisasi dan tugas pembantuan bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Salah satu produk berupa dokumen Kependudukan seperti : Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil dan Surat Keterangan Kependudukan memiliki dampak yang sangat besar. Baik aspek hukum, aspek politik, keamanan dan ketertiban, agama, sosial budaya dan lain-lain.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi OPD antara lain belum tersedianya informasi secara merata tentang pentingnya pelaporan atas terjadinya peristiwa pendudukan dan peristiwa penting yang mengakibatkan terbitnya dokumen pendudukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa cakupan kepemilikan dokumen pendudukan pada tahun 2024 ada yang belum tercapai.

Keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat mempengaruhi tujuan pertama yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi jangka menengah pembangunan Kabupaten Blora.

Besaran dengan berkembangnya berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Blora, akan terjadi mobilitas penduduk yang cukup tinggi, perubahan struktur masyarakat, dan berbagai perubahan lain yang perlu diamati dan dengan kesiapan dan ketekadian berbagai sumber daya. Salah satunya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi pendudukan yang memiliki arti strategis dalam menyokong pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Blora.

Ibu-ibu penting dalam penyalenggaraan tugas dan fungsi SKPD pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

### 1. Optimalisasi Cakupan Data Base Kependudukan

Data Kependudukan merupakan kumpulan data pertaorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data penduduk memiliki arti yang sangat penting dan strategis dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan, baik pembangunan pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan lain-lain.

Data penduduk yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersimpan di dalam data base

kependudukan, dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Hal tersebut disampaikan di dalam Pasal 83 ayat [1] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Oleh karena data penduduk memiliki arti yang sangat strategis, setiap penduduk Kabupaten Blora harus tercatat dalam Data Base Kependudukan dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Untuk meningkatkan kualitas data penduduk, setiap peristiwa kependudukan atau peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, diperlukan dapat dilaporkan dan dicatat pada setiap tingkatan pemerintahan dan selanjutnya diberikan dokumen kependudukan.

Melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setiap hari, data base kependudukan akan terjaga akurasiinya.

## 2. Penerapan KTP Elektronik

Pada tahun 2006 penerapan KTP elektronik akan tetap menjadi bagian prioritas sehingga masyarakat memahami akan manfaat dan fungisinya serta secara sadar datang ke tempat pelayanan untuk mendaftarkan diri dan mendapat pelayanan KTP elektronik. Pelayanan KTP elektronik memasuki tahap regular, dan akan lebih diterapkan kepada penduduk wajib KTP pemula yang baru berusia 17 tahun atau telah menikah.

Manfaat KTP elektronik adalah :

- a. Sebagai identitas jati diri berisku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal dalam pengurusan berbagai kepentingan.
- b. Mencegah terjadinya pemanfaatan dan KTP ganda.
- c. Dapat dipergunakan sebagai ID card dalam pembuatan ATM, asuransi dan lain-lain.
- d. Terciptanya akurasi data penduduk untuk mendukung program pembangunan lain.

### **3. Pencatatan Kelahiran**

Pencatatan kelahiran merupakan proses penting dalam membangun data base pendudukan yang akurat dan penaritian akta kelahiran memberikan kepastian hukum akan status seseorang di dalam keluarga.

Kendaraan masyarakat di Kabupaten Blora dalam memiliki akta kelahiran sudah baik. Hingga ini dapat dibuktikan sampai dengan akhir tahun 2026, kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun tercatat 99,55%. Dari jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 218.918 yang memiliki akta kelahiran sebanyak 217.929 anak. Diharapkan pada tahun 2026 semua anak memiliki akta kelahiran.

Beranjak dari permasalahan tersebut dan mengacu kepada Rencana Strategis Pencatatan Sipil Nasional bahwa "Semua anak Indonesia (usia 0-18 tahun) tercatat kelahirannya", terutama anak usia 0-5 tahun, kgiatan pencatatan kelahiran menjadi prioritas yang akan ditunjang dengan berbagai pelayanan.

Pelayanan penaritian akta kelahiran terutama bagi bayi usia 0-60 hari. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mengoptimalkan program Sehatit dengan mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Rumah Sakit, Klinik Bersalin dan Puskesmas.

### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2026, disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rancana pembangunan, pelaksanaan forum SKPD atau forum gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rancana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Pada rancangan awal Rencana kerja 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan anggaran sebesar Rp. 6.487.100.000,- (enam milyar empat ratus tujuh lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD sebagai ber-

Таблица 2.1  
Жалын тарбие жүйесіндегі тәсілдердің мөндиіттері

№	Бағдарламжылдар					Денсаулық мөндиіттері					Мөндиіт
	Нарынкадан	Денсаулық мөндиіттерінен	Паритеттің мөндиіттері	Денсаулық мөндиіттерінен	Нарынкадан	Нарынкадан	Денсаулық мөндиіттерінен	Паритеттің мөндиіттері	Денсаулық мөндиіттерінен	Нарынкадан	
1	Аудио-Визуалдық шаралып көрсетілген моделлік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық мұнай	1000	11 440 000,00	Аудио-Визуалдық шаралып көрсетілген моделлік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық мұнай	1000	11 440 000,00	-4
2	Компьютер, шарттыдан жасалған жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық, жеке міншілік, жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Компьютер, шарттыдан жасалған жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық, жеке міншілік, жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
3	Приемник Видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Приемник Видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
4	Компьютер, жеке жеке міншілік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Компьютер, жеке жеке міншілік	Шаблон мод.	Компьютерлік-презентациялық жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
5	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
6	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
7	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4
8	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	Шаблон мод.	Приемник видеома жеке міншілік жеке міншілік	1000	11 440 000,00	-4

Ref.	Bijvoegsel voor 2010					Aanvullend bijvoegsel					Merk teken
	Programma/Project	Code*	Invoer/Outvoer	Tijdper iode**	Basisvaluer	Programma/Project	Code*	Invoer/Outvoer	Tijdper iode**	Basisvaluer	
1. Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	1.000.000	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	1.000.000		
2. Automatische acties vervoer (Vlaams Rijk)	Standaard regel*	Automatische acties vervoer (Vlaams Rijk) en automatische acties vervoer	A/B/C	4.471.000.000	Automatische acties vervoer (Vlaams Rijk)	Standaard regel*	Automatische acties vervoer (Vlaams Rijk) en automatische acties vervoer	A/B/C	4.471.000.000		
3. Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.075.000	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.075.000		
4. Automatische acties vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Automatische acties vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.000.000	Automatische acties vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Automatische acties vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.000.000		
5. Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	4.471.000.000	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	4.471.000.000		
6. Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.000.000	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	Standaard regel*	Gebruik en herstel vervoer (Vlaams Rijk) en herstel vervoer (gemeenten Vlaanderen)	A	0.000.000		

No.	Bantuan dan Pendapatan					Bantuan dan Pendapatan					Masa Debit
	Program/Bagian Bantuan dan Pendapatan	Tujuan	Inisiatif/Prioritas	Tujuan Spesifik	Pencairan	Program/Bagian Bantuan dan Pendapatan	Tujuan	Inisiatif/Prioritas	Tujuan Spesifik	Pencairan	
	Perbaikan dan Pengamanan Bantuan dan Pendapatan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Perbaikan dan pengamanan peralatan dan peralatan pendukung	4	100.000.000	Perbaikan dan Pengamanan Bantuan dan Pendapatan	Alat-alat misi	Perbaikan dan pengamanan peralatan dan peralatan pendukung	4	100.000.000	
4	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	100	1.000.000.000	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	100	1.000.000.000	
	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	10.000.000	Pengamanan dan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan	4	10.000.000	
	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000.000	Pengamanan dan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000.000	
5	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	100	1.000.000.000	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	100	1.000.000.000	
	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000	
	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000	Pengamanan dan Bantuan dan Pendapatan Bantuan	Alat-alat misi	Pengamanan dan bantuan dan pendapatan bantuan	4	1.000.000	

No.	Kegiatan dan Rincian					Rincian Pendapatan					Sumber Pendapatan
	Kegiatan/Riwayat	Kode	Indeks/Prioritas	Tujuan Departemen	Target Minimal	Kegiatan/Riwayat	Kode	Indeks/Prioritas	Tujuan Departemen	Target Minimal	
	Penyelidikan dan Penelitian dan Terintegrasi Organisasi	B1000- 0001	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian dan Terintegrasi Organisasi	-	4000.000.000	Penyelidikan dan Penelitian dan Terintegrasi Organisasi	B1000- 0001	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian dan Terintegrasi Organisasi	-	4000.000.000	
	Penyelidikan dan Penelitian Organisasi	B1000- 0002	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian Organisasi	-A	4000.000.000	Penyelidikan dan Penelitian Organisasi	B1000- 0002	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian Organisasi	-A	4000.000.000	
-A	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Pengetahuan Sosial	B1000- 0003	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Pengetahuan Sosial	1000	800.000.000	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Pengetahuan Sosial	B1000- 0003	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Pengetahuan Sosial	1000	800.000.000	
	Penyelidikan dan Penelitian Organisasi, Inovasi Terintegrasi, Inovasi pengetahuan dengan pengetahuan sosial	B1000- 0004	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian Organisasi, Inovasi Terintegrasi, Inovasi pengetahuan dengan pengetahuan sosial	-B	40.000.000	Penyelidikan dan Penelitian Organisasi, Inovasi Terintegrasi, Inovasi pengetahuan dengan pengetahuan sosial	B1000- 0004	Indeks Organisasi Penyelidikan dan Penelitian Organisasi, Inovasi Terintegrasi, Inovasi pengetahuan dengan pengetahuan sosial	-B	40.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Organisasi	B1000- 0005	Indeks Organisasi Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Organisasi	-C	400.000.000	Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Organisasi	B1000- 0005	Indeks Organisasi Penelitian dan Pengembangan dan Pengembangan Inovasi Organisasi	-C	400.000.000	

No	Kebutuhan dan Pendekatan					Hasil Kinerja Pendekatan					Sumber Dana
	Program/Pengeluaran	Kode	Indikator Pencapaian	Tujuan Departemen	Target Waktu	Program/Pengeluaran	Kode	Indikator Pencapaian	Tujuan Departemen	Target Waktu	
1.	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan	Bantuan RPH	Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan	R&D	2023-2024	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan	Bantuan RPH	Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan	R&D	2023-2024	
			Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan Tingkat Dasar	R&D	2023-2024			Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan Tingkat Dasar	R&D	2023-2024	
			Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan Tingkat SMA	R&D	2023-2024			Bantuan Riset dan Penelitian Pendidikan Tingkat SMA	R&D	2023-2024	
2.	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan		2023-2024	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan		2023-2024	140.000.000
3.	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan		0	400.000.000	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan	0	400.000.000
4.	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan		0	400.000.000	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan	0	400.000.000
5.	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kelembaban dengan sifat tertentu		2023-2024	Penyelesaian Masalah Pendidikan Kependidikan Dasar	Bantuan RPH	Upaya memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan pendekatan masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, kelembaban dengan sifat tertentu		2023-2024	140.000.000

Nr.	Bewerkingen voor 2020					Aanvullende bewerkingen					Samenvatting
	Bewerking nummer	Aantal	Wijziging t.o.v.	Totale wijziging	Wijziging t.o.v.	Bewerking nummer	Aantal	Wijziging t.o.v.	Totale wijziging	Wijziging t.o.v.	
	Verhoogde toekomstvoorspel verkoopwaarde	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten (gewijzigd)	0	000.000.000	Verhoogde toekomstvoorspel verkoopwaarde	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten (gewijzigd)	0	000.000.000	
	Verhoogde verkoopvoorspel verkochte producten	01000 007	Proportioneel aan de verkochte producten verhoogde voorspel	100	000.000.000	Verhoogde verkoopvoorspel verkochte producten (gewijzigd)	01000 007	Proportioneel aan de verkochte producten verhoogde voorspel	100	000.000.000	
-1	Verlaagde voorraad tijdelijk	01000 007	Proactieve voorraadvoorschrijving tijdelijk verlaagd	-100	-000.000.000	Verlaagde voorraad tijdelijk	01000 007	Proactieve voorraadvoorschrijving tijdelijk verlaagd (gewijzigd)	-100	-000.000.000	
	Verlaagde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd	-10.000	-000.000.000	Verlaagde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	-10.000	-000.000.000	
-2	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	
	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	
	Verlaagde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	Verlaagde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Uit de voorverkoopvoorspel verkochte producten verwijderd (gewijzigd)	0	000.000.000	
	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Proportioneel 25% van verkochte producten uit de voorkennis van de vooraankondiging	-10	-000.000.000	Verhoogde voorraad tijdelijk verkochte producten verwijderd	01000 007	Proportioneel 25% van verkochte producten uit de voorkennis van de vooraankondiging	-10	-000.000.000	

No.	Kemengaran Kuta Selatan					Kecamatan Kuta Selatan					Jumlah %
	Alamat/ Nama	Jalan	Kelurahan/ Desa	Tahun Berkas	Ruangan	Alamat/ Nama	Jalan	Kelurahan/ Desa	Tahun Berkas	Ruangan	
3	Pemerintahan Kecamatan Mengwi/ Kuta Selatan Desa/ Kelurahan Mengwi/Kuta Selatan	Bukit ungu	Kelurahan/Desa Mengwi	14	80.000.000	Pemerintahan Kecamatan Mengwi/ Kuta Selatan Desa/ Kelurahan Mengwi/Kuta Selatan	Bukit ungu	Kelurahan/Desa Mengwi Kecamatan Mengwi/ Kuta Selatan Desa/ Kelurahan Mengwi/Kuta Selatan	14	80.000.000	
	Teknologi informasi komputer dan teknologi pertanian mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Luwih/Desa Mengwi/Kuta Selatan/Desa Mengwi mengwi/kuta selatan	9	100.000.000	Teknologi informasi komputer dan teknologi pertanian mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Luwih/Desa Mengwi/Kuta Selatan/Desa Mengwi mengwi/kuta selatan	9	100.000.000	
	Perusahaan Binaan desa mengwi/kuta selatan lautan dan bahan bangunan dan perkebunan	Bukit ungu	Luwih/Desa mengwi/kuta selatan/Desa lautan dan bahan bangunan dan perkebunan	4	40.000	Perusahaan Binaan desa mengwi/kuta selatan lautan dan bahan bangunan dan perkebunan	Bukit ungu	Luwih/Desa mengwi/kuta selatan/Desa lautan dan bahan bangunan dan perkebunan	4	40.000.000	
	Pengembangan pertanian buah mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Mengwi/Desa Mengwi pertanian buah mengwi/kuta selatan	10	10.000.000	Pengembangan pertanian buah mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Mengwi/Desa Mengwi pertanian buah mengwi/kuta selatan	10	10.000.000	
4	Pengembangan Buah mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Ingenjir/Desa Mengwi pertanian	9	10.000.000	Pengembangan Buah mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	Ingenjir/Desa Mengwi pertanian	9	10.000.000	
	Pengembangan pertanian Buah Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	petani buah/Desa Mengwi pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan	6	10.000.000	Pengembangan pertanian Buah Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan	Bukit ungu	petani buah/Desa Mengwi pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan pertanian Mengwi/Desa mengwi/kuta selatan	6	10.000.000	

## 2.5. Pencatatan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan arah dezentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja seantara memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menyerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Blora.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	-	-	-	-	-

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2024 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan antara lain yaitu :

1. Pemutakhiran Data Penduduk.
2. Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK).
3. Penerapan KTP elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil "Semua Anak Indonesia Tercatat Kehidupannya".

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan regular. Dimulai pada tahun 2012 dengan langkah-langkah perlahan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan regular kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Untuk memungkinkan pencatatan kehidupan seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki e-kelahiran.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaksud, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian Misi ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel", dengan tujuan "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil".

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu dengan program prioritas yang dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan kepemilikan KTP, KK dan KIA
2. Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
3. Pemanfaatan data kependudukan oleh OPD/lembaga pengguna melalui Perjanjian Kerjasama
4. OPD dan lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

#### 1. Tujuan Renja Perangkat Daerah

- Tujuan renjana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kualitas data base kependudukan
  - 2) Mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan
  - 3) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
  - 4) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan

#### 2. Sasaran Renja Perangkat Daerah

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAC)
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
- 3) Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur, memiliki integritas dan profesional
- 4) Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan
- 5) Meningkatnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah :



**Sesarengan Mbangun Blora :  
Unggul dan Berdaya Saing**

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari tiga frasa yaitu:

**1. Sesarengan Mbangun Blora**

Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholders terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

**Sesarengan Mbangun Blora**

1. Tambahan keberkelanjutan  
reli - reli kebersamaan dalam  
meningkatkan kinerja  
pemerintah, swasta dan masyarakat

2. Berkembangnya semangat  
kebersamaan dalam  
memusatkan dan memprioritaskan  
pertumbuhan.

3. Berkembangnya semangat  
kebersamaan dalam  
memusatkan dan merawat  
hasil pembangunan

**2. Unggul**

Unggul dapat dimaksud sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

## **Unggul**

**1**

Kondisi ekonomi masyarakat yang berkembang dan berdaya bertarung ketika risik

**2**

Kabupaten Blora yang unggul di Tingkat Provinsi dan Nasional

### **3. Berdaya Saing**

Berdaya saing dapat dimaksud sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini:

## **Berdaya Saing**

**1**

Kesiapan daerah dalam mengelola sumber dan proses, daya tarik dan aggresivitas pada sektor ekonomi, usaha dan buaya untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekuasaan daerah guna menyajikan masyarakat.

**2**

Kesiapan daerah dalam mengembangkan lingkungan yang produktif bagi iklim dan inovasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimaklum, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki fungsi strategis dalam pencapaian tujuan ketiga Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu "Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel", dengan tujuan "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan catatan sipil".

Secara singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora memiliki mandat yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka terwujudnya kualitas pelayanan publik dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yaitu dengan program prioritas yang dilaksanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya cakupan kepentikan KTP, KK dan KIA
2. Meningkatnya cakupan kepentikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun
3. Pemanfaatan data pendudukan oleh OPD/lambaga pengguna melalui Perjanjian Kerjasama
4. OPD dan lambaga yang memanfaatkan profil pendudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Slorai dihadapkan pada kendala di atas, namun dalam pelaksanaannya juga terdapat kondisi yang merupakan peluang bagi upaya pencapaian tugas.

Peluang tersebut diantaranya adalah :

1. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di daerah.
2. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan database Kependudukan

Ada beberapa kendala yang menghambat keberhasilan pencapaian indikator utama untuk cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), karena pelayanan jemput bola difokuskan pada pelayanan perekaman KTP Elektronik bagi penulis di sekolah-sekolah dalam rangka mendukung pelaksanaan Flieg dan Flpres.

Program dan kegiatan pada tahun 2026, dikatakan masuk ke dalam Program/Kegiatan Rutin SKPD dan Program/Kegiatan Urusan Wajib.

#### 4.1 Rencana Program dan Kegiatan :

Rencana program/kegiatan/tujuh kegiatan Ranja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Slorai tahun 2026 sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari :
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :
    - a. Panyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
    - a. Panyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Panyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
    - a. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
    - a. Panyediaan Komponen Infrastruktur Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - b. Panyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Bahan Logistik Kantor
    - d. Panyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- b. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Pengadaan Mobel
  - b. Pengadaan Serana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lepangan
  - b. Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### **B. Program Pendaftaran Penduduk**

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - b. Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Perintis Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dengan sub kegiatan :
  - a. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk

#### **C. Program Pencatatan Sipil**

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dengan sub kegiatan :
  - a. Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil

#### **D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :
  - a. Facilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan

#### **E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

1. Kegiatan Pengurusan Profil Kependudukan, dengan sub kegiatan terdiri dari :

a. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Uraian anggaran untuk rancana program/kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora pada rancangan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 sebesar 12.818.890.000,- (tiga belas miliar tiga ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Adapun rumusan Rancana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 (hasil input di SIPD-RI) sebagai berikut :

Федеральная служба по труду и занятости  
Российской Федерации  
Фонд социального страхования Российской Федерации

№	ФИО	Номер предприятия	Пол	Возраст	Квалификация	Место занятости	Срок занятости	Срок недействия	Причина отсутствия
1	Иванов Иван Иванович	12345678901234567890	М	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
2	Петров Пётр Петрович	12345678901234567890	М	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
3	Сидоров Сидор Сидорович	12345678901234567890	М	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
4	Сидорова Светлана Сидоровна	12345678901234567890	Ж	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
5	Сидоров Сидор Сидорович	12345678901234567890	М	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
6	Сидорова Светлана Сидоровна	12345678901234567890	Ж	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
7	Сидоров Сидор Сидорович	12345678901234567890	М	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь
8	Сидорова Светлана Сидоровна	12345678901234567890	Ж	35	Сервисный инженер	ООО "Альфа"	01.01.2018 - 01.01.2019	01.01.2019	Болезнь

Year	Period										
2010	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2011	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2012	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2013	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2014	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2015	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2016	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2017	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2018	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2019	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
2020	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3

№	Название	Код	Описание	Сроки	Контактные лица	Телефон	Факс

Номер	Наименование	Модель	Размер	Кол-во	Срок выполнения	Задача	Приоритет	Статус	Примечания	
									Номер	Наименование
1	Паркетная доска	Ламинат	ЛДСП	1	2024-06-20	Установка паркетной доски	Высокий	В работе	2024-06-20	Установка паркетной доски
2	Ламинат	Ламинат	ЛДСП	1	2024-06-20	Установка ламината	Высокий	В работе	2024-06-20	Установка ламината
3	Ламинат	Ламинат	ЛДСП	1	2024-06-20	Установка ламината	Высокий	В работе	2024-06-20	Установка ламината
4	Ламинат	Ламинат	ЛДСП	1	2024-06-20	Установка ламината	Высокий	В работе	2024-06-20	Установка ламината
5	Ламинат	Ламинат	ЛДСП	1	2024-06-20	Установка ламината	Высокий	В работе	2024-06-20	Установка ламината

Номер	Наименование	Код в реестре	Номер	Наименование	Код в реестре	Сведения о земельном участке			Номер	Наименование	Код в реестре
						Площадь	Границы	Предназначение			
1	Земельный участок	12345678901234567890	1	Земельный участок	12345678901234567890	1000 м²	Границы участка	Сельскохозяйственная	1	Земельный участок	12345678901234567890
2	Земельный участок	12345678901234567890	2	Земельный участок	12345678901234567890	1000 м²	Границы участка	Сельскохозяйственная	2	Земельный участок	12345678901234567890
3	Земельный участок	12345678901234567890	3	Земельный участок	12345678901234567890	1000 м²	Границы участка	Сельскохозяйственная	3	Земельный участок	12345678901234567890
4	Земельный участок	12345678901234567890	4	Земельный участок	12345678901234567890	1000 м²	Границы участка	Сельскохозяйственная	4	Земельный участок	12345678901234567890

№	Название	Адрес	Площадь	Составлено в соответствии с			Составлено	Проверено	Проверено
				Год	Месяц	День			
1	Библиотека № 1	ул. Степана Разина, 1	1500 м²	2023	07	15	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.
2	Библиотека № 2	ул. Красноармейская, 2	1200 м²	2023	07	15	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.
3	Библиотека № 3	ул. Красноармейская, 3	1000 м²	2023	07	15	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.
4	Библиотека № 4	ул. Красноармейская, 4	800 м²	2023	07	15	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.
5	Библиотека № 5	ул. Красноармейская, 5	600 м²	2023	07	15	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.	Лебедев А.С.

№	Номер	Наименование	Вес	Цена	Изображение	Компания	Установка	Год	Логотип
1	1001	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
2	1002	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
3	1003	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
4	1004	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
5	1005	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
6	1006	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
7	1007	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
8	1008	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
9	1009	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение
10	1010	Библиотека	150	3000	Изображение	Библиотека	Библиотека	2000	Изображение

Номер	Наименование	Код	Описание	Единица измерения	Колич-	Сроки	Сроки	Сроки